

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menilai suatu keberhasilan perekonomian suatu negara, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai indikator pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Menarik kembali sejarah perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia, infrastruktur merupakan salah satu sektor yang vital dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dijadikan pedoman dari reformasi kebijakan fiskal disektor penganggaran pembangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi dalam APBN-2017. Di dalam kebijakan tersebut, ditekankan bahwa tema kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah “Stimulus”, yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis), kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing), dan pembiayaan (utang untuk kegiatan produktif). Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah guna mencapai target pembangunan ekonomi negara, yaitu; meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, mengentaskan tingkat kemiskinan hingga 10,5%, mengurangi angka pengangguran sebanyak 5,6%, dan meningkatkan angka IPM (indeks) hingga 70,1%.

Peran dalam perencanaan adalah sangat vital dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pantjar Simatupang dan Saktyanu (2003), disebutkan bahwa perencanaan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan. Pembangunan tersebut dijadikan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) di tingkat nasional dan pada tingkat daerah yakni PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Dalam APBN 2017 tersebut tercatat pertumbuhan PDB per-komponen pengeluaran antara lain; 5,1% untuk konsumsi rumah tangga dan LNPR, 5,0% untuk konsumsi pemerintah, 6,0% untuk PMTB, 0,2% untuk ekspor dan 0,7% untuk impor. Kemenkeu (2017)

Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran paling banyak pada APBN 2017 ini, yaitu sebanyak 108 triliun rupiah, disusul oleh Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 101,5 triliun rupiah, Kementerian Kesehatan sebesar 58,3 triliun rupiah, Kementerian Keuangan sebesar 40,8 triliun rupiah, Kementerian Ristek & Dikti sebesar 39,7 triliun rupiah, dan Kementerian Pertanian sebesar 22,1 triliun rupiah. Depkeu (2017)

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Hal tersebut dapat tercapai dengan melalui peningkatan efisiensi belanja dan peningkatan *earmark*

Dana Transfer Umum yang dikhususkan untuk infrastruktur. Dana Transfer Umum merupakan bagian dari Transfer Ke Daerah yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam penggunaannya. Anggaran yang dialokasikan untuk infrastruktur dalam APBN 2017 adalah sebanyak 378,3 triliun rupiah pada sektor ekonomi, dan 5,5 triliun rupiah pada sektor sosial. Adapun sasaran infrastruktur yang ditargetkan pada APBN 2017 ini adalah pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer, pembangunan bandara atau melanjutkan proyek bandara sebelumnya dengan *total* 13 bandara, dan pembangunan tahap 1 pada jalur kereta api sepanjang 710 km^{sp}. Depkeu (2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Radiansyah (2012), dinyatakan bahwa infrastruktur secara umum berperan cukup signifikan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. The World Bank (1994) memberi batasan-batasan pada infrastruktur menjadi tiga bagian. Pertama, infrastruktur ekonomi berupa (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan jembatan, kanal, irigasi, dan drainase), dan sektor transportasi (rel kereta api, terminal, pelabuhan, bandara). Kedua, infrastruktur sosial seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi. Dan ketiga, infrastruktur administrasi berupa penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Ketersediaan infrastruktur di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur saat ini masih jauh tertinggal, adapun

kualitas infrastruktur menurut survey global yang dilakukan oleh WEF (*World Economic Forum*) adalah sebagai berikut:



Sumber: WEF, *Global Competitiveness Report 2017*

GAMBAR 1.1

Skor Kondisi Infrastruktur di Indonesia

Dalam data *Global Competitiveness Index* tersebut, dapat kita cermati bahwasanya kondisi infrastruktur di Indonesia memang mengalami fluktuasi ke arah yang positif dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih berada pada peringkat 52 dunia dengan nilai 4,5 dari skala 7,0. Sedangkan dari segi peringkat kualitas infrastruktur, posisi Indonesia masih menempati peringkat bawah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, yaitu pada kualitas jalan menempati urutan 64 dengan nilai 4,1, kualitas penyediaan pasokan listrik berada di urutan 84 dengan nilai 4,4. Data tersebut secara langsung menjadikan suatu alasan

dari dijadikannya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia sebagai pilihan prioritas.

Mengutip arti dari surat Al-Furqan ayat 48-49 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
 لِّنُعْجِزَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِي كَثِيرًا ﴿25:48﴾
 ﴿25:49﴾

“Dialah (Allah) yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, agar kami member minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

Dalam ayat ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Islam memaknai infrastruktur sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia disuatu negara. Para ahli ekonomi percaya bahwa segala perdebatan merupakan cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) setinggi-tingginya hingga dapat melampaui pertumbuhan penduduk. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) memainkan peran sebagai alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi disuatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara mendistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat *output*. PDRB yang menurun tiap tahunnya akan menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya itu, kegiatan perekonomian juga akan menurun yang pada akhirnya menurunkan pendapatan nasional. Dengan menurunnya pendapatan nasional, maka terciptanya peningkatan

pada angka kemiskinan dan pengangguran dalam suatu daerah.

Selain melakukan pembangunan infrastruktur, salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan yang didapatkan dari luar negeri dapat berupa investasi. Seperti yang dikemukakan oleh Harrod-Domar dalam teorinya mengenai persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu negara agar perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang yang mantap atau *steady growth*, guna mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk negara-negara dengan perekonomian yang berkembang seperti Indonesia. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkait sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan.

Sejatinya, modal asing telah lama berperan dalam pembangunan ekonomi. Menurut penelitian yang dilakukan Aniz (2003), terdapat empat pokok pemikiran yaitu pertama, sumber dana eksternal yaitu modal asing dapat dimanfaatkan oleh negara yang sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua,

pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perubahan struktur produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi.

Negara-negara yang sedang berkembang banyak memanfaatkan penanaman modal asing sebagai dana tambahan diluar tabungan domestik. Tingkat pendapatan di negara berkembang yang rendah menyebabkan negara berkembang seperti indonesia mengalami kesulitan dalam membiayai pembangunan. Akumulasi modal tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan biaya yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, untuk memenuhi kekurangan tersebut Indonesia mengusahakan sumber dana eksternal berupa investasi asing. Bersama-sama modal dalam negeri, pembiayaan yang berasal dari luar negeri diharapkan mampu mengangkat kegiatan ekonomi negara dari kelesuan.

Investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu sejak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967. No. 11 Tahun 1970 tentang PMA. Di dalam undang undang tersebut dikatakan bahwa:

“Dalam pada azas itu untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memmanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi, dan skill yang tersedia diluar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengabaikan ketergantungan terhadap luar negeri.”

Menurut undang-undang tersebut kita dapat menilai jelas bahwasanya Indonesia tidak melarang investasi asing masuk untuk

membantu pembangunan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat. Namun, kita juga harus menghindari dari ketergantungan pada luar negeri.

Perkembangan nilai realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Indonesia cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai penanaman modal asing di Indonesia sebesar US\$ 28.617, dan pada tahun 2014 realisasi PMA di Indonesia mengalami penurunan menjadi US\$ 28.529, lalu naik menjadi US\$ 29.275 yang disebabkan adanya revisi DNI (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014). Dan kembali menurun ditahun 2016 sebesar US\$ 28.964. Dan melonjak tinggi pada tahun 2017 yakni sebesar US\$ 32.239. Usaha pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dengan bantuan negara lain dilakukan dengan menarik investor luar negeri untuk menanamkan dananya ke Indonesia serta dengan pengadaan pinjaman atau utang luar negeri. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia, mengingat tidak kondusifnya iklim investasi di Indonesia akibat ketidakstabilan kebijakan dan buruknya infrastruktur.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel penggunaan air, kapasitas listrik lokal, infrastruktur jalan dan juga penulis menambahkan explanatory variable berupa PMA (Penanaman Modal Asing). Penelitian ini

mencakup pada 33 provinsi, menambahkan satu provinsi baru, yakni Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia, Provinsi ini dijadikan provinsi baru secara sah pada 25 oktober 2012.

Dari besarnya pembangunan infrastruktur dan investasi asing yang masuk di Indonesia memberikan penulis pertanyaan-pertanyaan, mengenai

pengaruh variabel-variabel ekonomi tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, guna mengetahui apakah infrastruktur jalan, air, dan listrik serta PMA (Penanaman Modal Asing) mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGGUNAAN AIR, KAPASITAS LISTRIK LOKAL, INFRASTRUKTUR JALAN, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2013-2017”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dapat kita lihat bahwasanya pembangunan infrastruktur prasarana di Indonesia sudah berlangsung cukup lama dan juga investasi asing yang masuk ke Indonesia cukup besar.

Rumusan masalah tersebut dimasukkan kedalam pertanyaan peneliti. Sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran air terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kapasitas listrik lokal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh PMA (Penanaman Modal Asing) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran air terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh kapasitas listrik lokal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh PMA (Penanaman Modal Asing) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penulis berharap penelitian ini memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai kontribusi penyaluran air, kapasitas listrik lokal, infrastruktur jalan dan PMA terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan motivasi untuk terus memperluas wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan.

3. Bagi Pemerintah

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun informasi bagi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan yang terkait pada pembangunan infrastruktur dan penanaman modal asing di Indonesia.